

**DETERMINAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Drajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh :
Merlin Nurhandayani
Nim : 31401800096**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi
DETERMINAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL)

Disusun Oleh :

Merlin Nurhandayani

NIM : 31401800096

Telah disetujui oleh pembimbing oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, November 2021

Pembimbing

Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211415029

HALAMAN PERSETUJUAN

DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL)

Disusun Oleh :

Merlin Nurhandayani

Nim : 31401800096

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, November 2021

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211492004

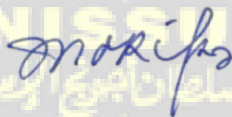
Penguji II



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE., M.Si

NIDN. 0617057602

Pembimbing



Dr. Hj. Indri Kartika, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211415029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal, November 2021

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si

NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Merlin Nurhandayani

NIM : 31401800096

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Tegal)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, November 2021

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Merlin Nurhandayani
NIM	:	31401800096
Program Studi	:	S1 Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
Alamat Asal	:	JL. Jawa RT 02 RW 03 No.16 Langon Kudaile, Slawi
Email	:	merlinnurhandayani11@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi*dengan judul : **“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Tegal)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2021

*Coret yang tidak perlu.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Puncak prestasi adalah kerendahan hati”

“Tetaplah berbuat baik walaupun tidak dibalas dengan kebaikan. Karena ganjaran kebaikan itu bukan urusan manusia, tetapi urusan kita dengan Allah”

“Bukan kita yang hebat, Tapi doa ibumu yang kuat”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak tercinta
- Keluarga tercinta
- Sahabat dan teman-temanku tercinta



ABSTRACT

Village fund management accountability is a concept that must be used appropriately in organizations to account for resource management to the authorities in the form of village fund management reports according to applicable standards and ensure values such as efficiency, effectiveness, constraints and predictability. Accountability has an important role in organizations to prevent abuse and irregularities that often occur. This study aims to examine the effect of human resource competence, digitalization, and village governance. The population of this study is the village government in several Adiwerna and Slawi sub-districts in Tegal district. Sampling using the saturated sampling method resulted in a sample of 104 respondents. In this study, the data used are primary data. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The results of the study indicate that the competence of human resources has a significant positive effect on the accountability of village fund management. Digitalization has a significant positive effect on the accountability of village fund management. Village governance has a significant positive effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Competence of human resources, digitalization, village governance, accountability.



ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan konsep yang harus digunakan secara tepat dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berwenang berupa laporan pengelolaan dana desa sesuai standar yang berlaku dan memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, kendala dan prediktibilitas. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam organisasi guna mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan yang sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa. Populasi penelitian ini adalah pemerintah desa di beberapa Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Slawi di Kabupaten Tegal. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh menghasilkan sampel sebanyak 104 responden. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tata kelola desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, tata kelola desa, akuntabilitas.



INTISARI

Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, penyajian, pelaporan dan pengungkapan kepada pihak yang berwenang berupa laporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku dan memperhatikan nilai-nilai dalam pelaporan tersebut. Pada saat ini mengungkapkan akuntabilitas beragam, sehingga diperlukan penelitian untuk menguji dan mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia, dimana jika adanya sumber daya manusia maka akan menentukan hasil kualitas yang kompetitif pada pemerintahan. Faktor yang lainnya adalah digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memudahkan penyampain informasi kepada masyarakat. Tata kelola desa diprediksi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendeteksi *fraud* yang sering terjadi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki kecenderungan dalam menghasilkan kualitas yang baik dalam pemerintahan (Dewi&Gayatri, 2019; Nurhakim&Yudianto, 2018; Ardianti&Suartana, 2020). Selain itu beberapa penelitian menemukan bukti bahwa digitalisasi mampu memudahkan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Hendaris&Romli, 2021; Aziiz&Prastiti, 2019; Nurkhasanah, 2019). Pada penelitian terkait tata kelola desa, beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan tata kelola desa selalu memberikan pengoptimalan untuk mencapai tujuan pemerintah (Ubaidillah&Arumsari, 2019; Ardianingsih&Mutmainah, 2019).

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : “*Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia,*

digitalisasi, dan tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?”. Dengan demikian tujuan utama studi ini tidak lain adalah menguji dan menganalisis kembali dari penelitian sebelumnya terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kajian pustaka kemudian menghasilkan 3 hipotesis. Pertama, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua, Digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga, Tata Kelola Desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Slawi di Kabupaten Tegal. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Terdapat sebanyak 104 sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam pengujian teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda menggunakan program SPSS versi 25.0

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa benar-benar memiliki peran penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa studi kasus di Kabupaten Tegal. Kemudian berdasarkan uji signifikan simultan, juga diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Dengan demikian seluruh variabel indepen (kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa) memiliki pengaruh untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai standar yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Tegal)** yang disusun sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E, M.Si.Ak, CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dengan sabar, memberikan arahan, motivasi, kritik dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua tersayang, bapak Sutrisno dan ibu Sukartini yang senantiasa mendoakan, membimbing dan mendukung baik dalam segi moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kakak-kakakku yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Temenku Aulin, Nindy, Rita, Nela, Laila, Nurul, Afifah, Devi, Gita, Mas Fikri, Mas Dimas, Mas Ilham, Farhan, Ubay, Farid yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, November 2021

Peneliti

Merlin Nurhandayani
NIM 3141800096



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
INTISARI	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	8
2.2 Akuntabilitas Dana Desa	9
2.3 Kompetensi SDM.....	11
2.4 Digitalisasi.....	11
2.5 Tata Kelola Desa	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	14
2.7 Pengembangan Hipotesis	18
2.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas	

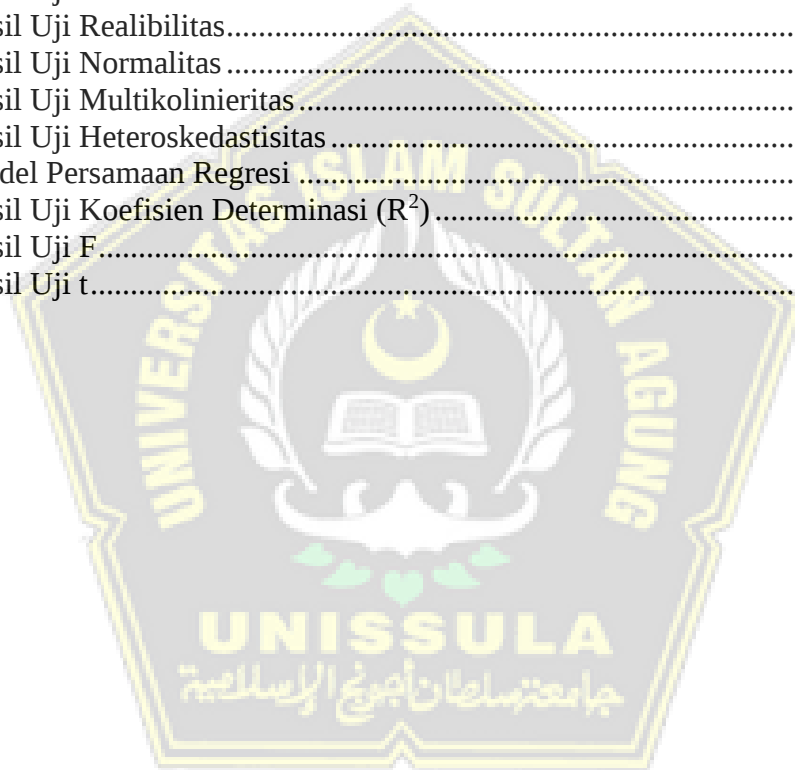
Pengelolaan Dana Desa	18
2.7.2 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ..	19
2.7.3 Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	20
2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel	23
3.2.1 Populasi.....	23
3.2.2 Sampel	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	26
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	26
3.5.2 Variabel Independen (X)	26
3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	27
3.6 Teknik Analisis.....	28
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	28
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	28
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	29
3.6.4 Pengujian Hipotesis.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	34
4.2.1 Karakteristik Responden.....	35
4.2 Analisis Data	37
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel	37
4.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	43
4.3.1 Hasil Uji Validitas Data.....	43
4.3.2 Hasil Uji Realibilitas.....	45
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	46
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	47
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	49

4.6	Pengujian Hipotesis	50
4.6.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
4.6.2	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	51
4.6.3	Hasil Uji Parsial (Uji t)	52
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	53
4.7.1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	53
4.7.2	Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ..	54
4.7.3	Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	55
BAB V PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Keterbatasan	58
5.3	Saran	58
5.3.1	Bagi Akademisi	58
5.3.2	Bagi Pemerintah Desa	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN – LAMPIRAN		65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	27
Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner	34
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	35
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	37
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	38
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Digitalisasi	39
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Tata Kelola Desa.....	40
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	42
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Data.....	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Realibilitas.....	45
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4. 15 Model Persamaan Regresi	49
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
Tabel 4. 17 Hasil Uji F.....	51
Tabel 4. 18 Hasil Uji t.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka PemikiranTeoritis	22
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Kecamatan Slawi	66
Lampiran 2 Surat Izin Kecamatan Adiwerna.....	67
Lampiran 3 Surat Bapedda.....	68
Lampiran 4 Surat Izin Balai Desa Kecamatan Slawi.....	69
Lampiran 5 Surat Izin Balai Desa Kecamatan Adiwerna	70
Lampiran 6 Tanda Izin Pengambilan Data Penelitian	701
Lampiran 7 Format Kuesioner	73
Lampiran 8 Tabulasi	81
Lampiran 9 Analisis Deskriptif.....	89
Lampiran 10 Hasil Uji Kualitas Data.....	91
Lampiran 11 Hasil Output SPSS 25.0.....	94
Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait keberadaan desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdampak pada kewajiban pemerintah untuk bertanggungjawab atas terselenggaranya pembangunan, kesadaran sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan secara mandiri yang di dalamnya termasuk pengelolaan asset, keuangan, dan pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa diungkapkan oleh (Firmanzah., 2014).

Upaya pembaharuan yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya dengan mengalokasikan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk mendorong pembangunan wilayah pedesaan yang lebih baik. Kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada bidang pembangunan terlihat dari kenaikan alokasi dana desa yang diberikan ke seluruh desa di Indonesia (Sugiarti & Yudianto, 2017). Dana desa adalah dana APBN yang dicadangkan untuk desa yang di transfer oleh APBD Kabupaten/Kota guna memprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Ardianti & Suartana, 2020).

Sejak awal pelaksanaan dana desa pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar 20 triliun rupiah (Kemenkeu.go.id, 2019). Besaran

alokasi dana desa dari tahun ke tahun selalu meningkat sebagai wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan alokasi dana desa di Indonesia. Besaran dana desa tahun 2016, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 46,7 triliun tahun 2017, dana desa meningkat menjadi Rp 59,8 triliun. Dana sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2018 meningkat pada tahun 2019 mencapai Rp 69,8 triliun. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 71,2 triliun dan pada tahun 2021 dana desa meningkat menjadi Rp 72 triliun dilansir dari (<https://kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>). Besaran dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran terkait kesediaan desa mengelola dana desa secara mandiri dan bertanggung jawab. Tuntutan pengelolaan dana desa perlu diperhatikan, termasuk masalah tata pemerintah yang baik (*good governance*) dimana akuntabilitas menjadi bagian dari pilarnya.

Akuntabilitas termasuk faktor penting dalam pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala kegiatan/proker yang dirancang dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas sebagai kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala sesuatu kepada principal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting dalam menekankan penyelewengan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge, S., dan Pattaro, 2011). Khususnya terkait dengan terbitnya Permendagri No.113/2014 Pasal 9 Ayat 2 berkaitan dengan pendapatan desa yang berasal dari kelompok transfer yaitu jenis dana desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) di tahun 2015, oleh karena itu salah satu kewajiban administratif pemerintah desa adalah melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak terlepas dari jumlah dana desa yang dikeluarkan dari tahun ke tahun meningkat cukup

signifikan hingga mencapai total triliunan rupiah setiap desa sehingga berdampak pada rentannya dana desa terhadap penyelewengan korupsi.

Kebijakan yang terdapat pada dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa dimana masih terjadi kendala yang timbul dari kurangnya pengetahuan apatur desa dalam hal tata kelola dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat kemungkinan penyelewengan/korupsi (Masruhin & Kaukab, 2019). Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* terkait penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2019 sektor yang paling banyak dikorupsi adalah dana desa. Terdapat 46 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 32,2 miliar (Kompas.com, 2020). Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 879 km², Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tegal belum mencapai yujuan yang diinginkan, perihal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan tidak tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga terjadi korupsi dalam penyalahgunaan dana desa (Abidin, 2015). Dilansir dari <https://korantegal.com/> di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terjadi kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) yang melibatkan beberapa Kades seperti yang terjadi pada Kades Kedungsukun (Adiwerna), Maribaya (Kramat), Kedungwungu (Jatinegara) dan Jembayat (Kecamatan Margasari). Kepala Desa di Desa Kedungsukun dan Gumalar Kecamatan Adiwerna diduga telah melakukan korupsi uang alokasi dana desa (ADD) karena tidak menyelesaikan APBDes dari tahun 2017 dan 2018, Kepala Desa Maribaya Kecamatan Kramat di tahun 2018 melakukan dugaan penyalahan gunaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa Kedungwungu melakukan tindakan korupsi penyalahgunaan nominal dana desa

sebesar Rp 160 juta pada tahun 2020 dan kasus terbaru pada tahun 2021 didesa Jembayat Kecamatan Margasari melakukan tindakan korupsi penyalahgunaan dana desa dan penyalahgunaan dana bansos covid-19 dengan total sebesar Rp 693 juta. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menegaskan bahwa yang menjadi pengaruh terjadinya penyelewengan dana desa yaitu kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, minimnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, kelembagaan desa yang kurang optimal, dan biaya politik yang tinggi akibat persaingan di arena pemilihan kepala desa (www.antikorupsi.org).

Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, penelitian ini bermaksud menjelaskan determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Faktor penentu bagi suatu organisasi atau lembaga pemerintahan adalah kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi yang dihasilkan akan menentukan kualitas kompetitif dari lembaga pemerintahan. Dalam pengelolaan dana desa diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dan tanggungjawab untuk mengelola dana desa yang nantinya akan dikaitkan dengan pembangunan desa (Diansari, 2015).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ardianti & Suartana, 2020). Namun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti pada penelitian (Widyatama et al., 2017) menyatakan tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang diprediksi mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah digitalisasi. Digitalisasi secara merata telah digunakan di berbagai sektor untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan

efisien. Kewajiban digitalisasi ini telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 yang mengatur bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019). (Hendaris & Romli, 2021) dan (Aziiz & Prastiti, 2019) membuktikan bahwa digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlawan et al., 2020) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tata Kelola Desa juga diprediksi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan interaksi antar sektor dalam memproses dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan. Dalam hal ini tata kelola memiliki peran penting dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi sehingga dapat membantu mengoptimalkan tujuan pemerintah yang sudah ditetapkan. (Ubaidillah & Arumsari, 2019) membuktikan bahwa tata kelola desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian (Zeyn, 2011) membuktikan tata kelola desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan terlebih dulu tidak terdapat konsistensi dari hasil penelitian sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Aziiz & Prastiti, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sampel penelitian diambil di Kabupaten Tegal sedangkan penelitian sebelumnya diambil di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu peneliti menambahkan

variabel tata kelola desa. Alasan untuk mengapa memilih variabel tata kelola desa adalah pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan untuk membantu mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan yang baik serta dapat mengoptimalkan aktivitas operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian (Aziiz & Prastiti, 2019) dimana besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 57,9% sehingga ada kemungkinan variabel lain diluar penelitian berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana pengaruh Digitalisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana pengaruh Tata Kelola Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Menganalisis pengaruh Digitalisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

3. Menganalisis pengaruh Tata Kelola Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini bisa diharapkan agar dapat menjadi tolak ukur dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan panduan bagi aparatur desa di Kabupaten Tegal guna mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan antara dua pihak, yaitu *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Teori agensi beranggapan bahwa setiap individu hanya terpengaruh oleh kebutuhan dirinya sendiri sehingga memunculkan konflik antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Upaya pencegahan serta pengurangan konflik keagenan mengakibatkan biaya keagenan (*agency cost*) yang dikeluarkan oleh *principal* maupun agen. Biaya keagenan adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan *principal* dalam pengawasan kepada *agent*. Biaya keagenan menurut (Jensen & Meckling, 1976) di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya anggaran yang muncul dan dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku agen seperti mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku agen. *Bonding cost* adalah anggaran biaya ditanggung oleh agen untuk memastikan dan mengikuti prosedur dan memastikan bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selain itu, *Residual cost* adalah loyalitas dalam bentuk penurunan kemakmuran *principal* sebagai dampak dari perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal*. Menurut (Dewi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa timbulnya masalah keagenan terjadi ketika ada perbedaan tujuan dan pemisahan antara *principal* dan agen. Dengan demikian, teori agensi memperkuat alasan mengapa diperlukannya pertahanan prosedur control.

Agency Theory menjelaskan bahwa aparatur desa sebagai agen bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak secara sadar untuk kepentingannya sendiri dan menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak wajar demi kepentingan masyarakat. *Agency Theory* banyak terjadi informasi asimetris antara agen yang mempunyai akses informasi langsung dengan *principal*, yang menyebabkan munculnya masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan *Agency Theory* dengan Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dimana pemerintah desa bertindak sebagai pihak yang diamanahi (agen) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas ini sebagai penyalarsan intensif yang dihadapi *principal* dan agen dengan pemerintah dan masyarakat yang berfokus pada input guna meningkatkan pelayanan yang efektif (Shields et al., 2021). Keterkaitan ini diharapkan mampu membantu pelaksanaan perangkat desa dalam menyelenggarakan kepemimpinan dan koordinasi pengelolaan dana desa serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mampu memegang kepercayaan publik dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan menginformasikan dengan bebas terkait laporan pengelolaan dana desa kepada publik. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdampak terhadap berkurangnya informasi yang asimetris. Berkurangnya asimetris informasi maka permasalahan pada pengelolaan dana desa akan menjadi sedikit atau kecil.

2.2 Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana desa dapat diartikan sebagai hak yang diperoleh desa dari pemerintah dalam pembangunan desa dan pemangku berkewajiban mengelola keuangan dengan baik. Akuntabilitas adalah konsep yang harus digunakan dengan benar di dalam organisasi (Widyatama et al., 2017). Akuntabilitas penting dalam menjamin nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan dan prediktibilitas (Purba et al., 2020). Secara umum akuntabilitas disajikan sebagai praktik rasional untuk memastikan pertanggungjawaban oleh masyarakat dan pemerintah yang harus diterapkan (Sanusi et al., 2015). Menurut Riyanto dalam (Sugiarti & Yudianto, 2017) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berwenang berupa laporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku dan memperhatikan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan realibilitas dalam pelaporan tersebut. Dapat diartikan bahwa akuntabilitas berperan penting untuk meminimalisir penyalahgunaan dan penyimpangan sumber daya bagi kepentingan publik. (Aziiz & Prastiti, 2019) mengelompokkan akuntabilitas menjadi lima bagian yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Akuntabilitas memiliki prinsip bahwa prosedur pengelolaan diawali dari perencanaan, persiapan, dan implementasi yang akurat untuk diberikan dan dipertanggungjawabkan ke daerah. (Aziiz & Prastiti, 2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban aparatur pengelola keuangan desa guna mempertanggungjawabkan dan menyetorkan segala aktivitas keuangan desa dalam laporan pertanggungjawaban atas pihak yang berwenang.

2.3 Kompetensi SDM

Sumber daya manusia berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, sebab laporan yang baik tidak akan terealisasi tanpa ada campurtangan sumber daya manusia yang baik pula (Aziiz & Prastiti, 2019). Sumber daya manusia yang berkualitas harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena kompetensi berkualitas dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa tersebut (Purba et al., 2020). Kompetensi sumber daya manusia adalah kecakapan seseorang guna menjalankan tugas pemerintahan desa dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa. Pemerintah desa, termasuk perangkat desa harus memiliki ketrampilan yang berkualitas, karena akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ardianti & Suartana, 2020).

Sumber daya manusia yang bermutu akan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan dilakukannya pelatihan sumber daya manusia diharapkan mampu meningkatkan *technical skill*, *human skill*, *manajerial skill* guna mengembangkan potensi kompetisi dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan keuangan dana desa. Semakin besar potensinya maka akan semakin mudah untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM termasuk faktor penting yang mempengaruhi baik atau tidaknya pemerintahan desa dalam mengelola keuangan dana desa tersebut.

2.4 Digitalisasi

Digitalisasi berperan penting di zaman sekarang guna menunjang kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. Digitalisasi adalah sarana dan prasarana (*hardware*, *software*, *useware*) sistem untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan

menyebarkan informasi secara akurat (Warsita, 2008). Penggunaan digitalisasi yang berbasis teknologi informasi wajib dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan kualitas terbaik dalam pengelolaan dana desa dan memberikan kesesuaian atau keakuratan informasi terhadap publik untuk mengurangi kesalahan yang sering terjadi (Aziiz & Prastiti, 2019).

Komponen teknologi informasi salah satunya adalah komputer. Komputer merupakan alat untuk mempercepat kinerja manusia dan membantu menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan manusia (Sugiarti & Yudianto, 2017). Teknologi informasi yang digunakan ini memiliki manfaat yang dapat mempercepat proses administrasi dan pembuatan laporan akuntabel dengan memperhatikan keakuratan dalam perhitungan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik (Dariana, 2020). Digitalisasi merupakan sistem yang menerapkan pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut disebut dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem yang dibuat oleh BPKP ini digunakan untuk mengadministrasikan dan mengolah keuangan dana desa sebagai dasar pengambilan keputusan guna mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa (Hendaris & Romli, 2021).

Pemanfaatan dengan menggunakan sistem digitalisasi ini mampu memperlancar dan mempermudah perangkat desa dalam mengevaluasi kesalahan yang sering terjadi. Teknologi informasi baik digunakan dalam meningkatkan kemampuan manusia untuk membantu kinerja dan menentukan kesesuaian informasi dalam mengelola keuangan dana desa agar lebih terbuka dan responsibel. Sistem ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa guna memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa secara mandiri dan bertanggungjawab dengan laporan yang dihasilkan (Mantako et al., 2019).

2.5 Tata Kelola Desa

Tata kelola (*governance*) adalah referensi terbaru yang digunakan dalam tatanan pemerintahan. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik pula (Ardianingsih & Mutmainah, 2019). Menurut (Ubaidillah & Arumsari, 2019) peranan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewenangan dan kewajiban dalam perencanaan dan pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan prinsip tata kelola dalam pengelolaan dana desa perlu diperhatikan tiga hal yaitu transparan, partisipatif, dan akuntabel. (Makalalag et al., 2017) Transparan adalah penyampaian informasi secara terus terang dan jujur kepada publik untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan kesepakatan pada aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya akuntabel merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keakuratan laporan keuangan dana desa tersebut (Makalalag et al., 2017).

Tata kelola mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan akan membantu memperbaiki pengelolaan dana desa tersebut agar sinkron dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan. UNDP (United Nations Development Programme) berpendapat bahwa tata kelola dikatakan baik bila menerapkan dan mengembangkan prinsip tata kelola dalam sistem pemerintah tersebut meliputi : partisipasi yang melibatkan perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan, hukum yang mampu memastikan perangkat desa mematuhi dan menegakkan peraturan yang berlaku, transparansi yang bersifat terbuka dan menyediakan informasi secara akurat dan mudah dipahami untuk

mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintah yang diambil, keadilan yang berkualitas dalam mengambil keputusan yang disediakan oleh pemerintah agar bebas dari konflik dan diskriminasi guna untuk menghargai keberagaman dan mengupayakan persatuan masyarakat, akuntabel dalam menyajikan laporan keuangan dana desa sesuai dengan basis data yang dimiliki, efektivitas dan efisien dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah dengan memastikan pencapaian tujuan dan penerapan sistem yang tepat (Hartikayanti & Jayanti, 2020).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor Kompetensi Sumber Daya, Digitalisasi, dan Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Arum Ardianingsih, Ina Mutmainah (2018)	-Independen : Tata Kelola Pemerintah Desa -Dependen : Akuntabilitas Dana Desa	-Sampel : Desa dalam kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan -Metode : Reduksi Data, Wawancara, dan Observasi	Tata kelola berpengaruh signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa.
2.	Putu Ayu Ratih Ardianto, I Wayan Suartana (2020)	-Independen : Kompetensi SDM, Sistem Keuangan Desa -Dependen : Akuntabilitas pengelolaan dana	-Sampel : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Seksi sebanyak 126 responden	Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem Keuangan Desa positif signifikan terhadap akuntabilitas

		desa	-Metode : Analisis Regresi Linear Berganda	pengelolaan dana desa.
3.	Muhammad Nur Aziiz, Sawitri Dwi Prastiti (2019)	-Independen : Kompetensi aparatur desa, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -Dependen : Akuntabilitas dana desa	-Sampel : 44 aparat desa -Metode : Analisis Regresi	Kompetensi aparatur desa signifikan terhadap variabel dependen. Pemanfaatan TI positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.
4.	Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto (2017)	-Independen : Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, Partisipasi penganggaran -Dependen : Akuntabilitas pengelolaan dana desa	-Sampel : Desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Karawang Timur, Majalaya, dan Rengasdeklol -Metode : Analisis Regresi Linear Berganda, Kuisioner	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Astri Juainita Makalalag dkk (2017)	-Independen : Prinsip tata kelola (transparan,akuntabel,danpartisipatif),Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban -Dependen : Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : Enam (6) desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan jumlah informan 21 (dua puluh satu) terdiri dari pengelola dana desa dan tim fasilitasi dana desa. -Metode : Analisis Isi, Reduksi Data	Prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban mempunyai signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
6.	Hasian Purba dkk (2020)	-Independen : Kompetensi aparatur, Komitmen organisasi, Partisipasi masyarakat -Dependen :	-Sampel : Pemerintah desa aparat di Kecamatan pangandaran Kabupaten pangandaran secara acak -Metode :	Adanya pengaruh antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi signifikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa manajemen. Partisipasi masyarakat

		Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Analisis Regresi Berganda	positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7.	Heni Nurani Hartikayani (2020)	-Independen : Kompetensi Perangkat Desa Pemahaman Peraturan Keuangan Motivasi Transparansi Responsivitas Keadilan Memberikan Informasi -Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	-Sampel : 36desa di 4 kecamatan Bandung Raya -Metode : Analisis Data Klasik Uji Asumsi, <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) <i>Lisrell</i>.	Kompetensi perangkat desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Pemahaman peraturan keuangan perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Motivasi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Responsivitas perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Keadilan memberikan informasi mempunyai keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
8.	Budi Hendaris (2021)	-Independen : Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi Kinerja Aparatur Akuntabilitas Dana Desa -Dependen :	-Sampel : Perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat -Metode : Analisis data SEM PLS	Terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kualitas Laporan Keuangan		akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kinerja aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan adanya hubungan antara laporan keuangan. Akuntabilitas dana desa positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9.	Siska Apriana (2019)	-Independen : Komitmen Organisasi Kompetensi Pengelolaan Dana Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi -Dependen Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-Sampel : Perangkat desa di 13 des Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan Kecamatan Mangkutana -Metode : Analisis Regresi Linear Berganda	Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
10.	Irman Nurhakim, Ivan Yudianto (2018)	-Independen : Perencanaan, Pelaksanaan, Administrasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban -Dependen : Pengelolaan Dana Desa	-Sampel : Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) -Metode : Kualitatif	Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Administrasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pelaporan signifikan pada pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban memiliki pengaruh signifikan pengelolaan dana desa.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan penelitian ini bertujuan guna menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam mengimplementasikan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berkualitas tidak akan terselenggara tanpa campur tangan sumber daya manusia.

Kompetensi sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah dalam menghasilkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akurat sesuai dengan aturan berlaku. Menurut Alan G. Hevesi dalam (DiNapoli, 2007) upaya dalam mengoptimalkan tujuan tersebut, sumber daya manusia yang dimiliki harus memiliki *skill*, *knowledge*, dan *ability* untuk menunjang kinerja yang maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil data peneliti sebelumnya yang dilaksanakan (Dewi & Gayatri, 2019) serta (Nurhakim & Yudianto, 2018) membuktikan bahwa kompetensi

sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.7.2 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Digitalisasi yang menyeluruh telah digunakan di berbagai sektor untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan efisien. Pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan tepat guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkualitas dan mempermudah penyampaian informasi kepada publik.

Pengelolaan dana desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan keakuratan dan kesesuaian informasi yang dihasilkan serta meminimalisir kesalahan yang sering terjadi. Menurut (Laka, 2020) digitalisasi dengan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa dapat membantu untuk meningkatkan transparansi, mengurus, dan memproses pengelolaan dana desa yang berguna bagi masyarakat yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pertanggungjawaban laporan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Hendaris & Romli, 2021) dan (Nurkhasanah, 2019) menghasilkan Digitalisasi (Pemanfaatan Teknologi Informasi) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Digitalisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.7.3 Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut (Ubaidillah & Arumsari, 2019), tata kelola desa yang baik akan mewujudkan penyelenggaraan desa, pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan dalam menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur, partisipatif pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan dana desa.

Menurut (Kurniasih & Israwan Setyoko, 2019) tata kelola yang baik diartikan sebagai interaksi antar sektor dalam memproses dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas pengelolaan yang baik. Selain itu, tata kelola yang baik memiliki peran penting untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan (*fraud*). Pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintah desa dapat menjaga kredibilitas informasi keuangan dan mewujudkan pemerintah yang jujur dan akuntabel dalam mengolah laporan keuangan desa. Tata kelola yang baik dapat dilihat dari kenyataan bahwa pemerintah telah bekerja secara efektif dan efisien dalam mengotimalkan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari komitmen semua pihak yang menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Ubaidillah & Arumsari, 2019) dan (Ardianingsih & Mutmainah, 2019) menghasilkan bahwa Tata Kelola Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Tata Kelola Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

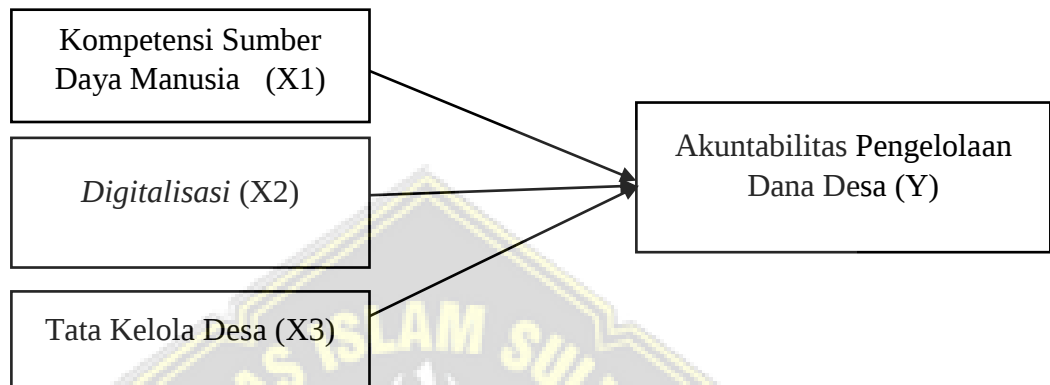
2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada satu teori, yaitu *Agency Theory*. *Agency Theory* menjelaskan bahwa pemerintah desa (agent) mendapat amanah dari masyarakat (*principal*). Pemerintah desa sebagai agen untuk masyarakat akan berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya. Pemerintah desa sebagai pihak yang diamanahi oleh agen akan menyajikan laporan terkait pengelolaan keuangan dengan memperhatikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan membantu penyelenggara pemerintahan desa mengkoordinasikan pengelolaan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Digitalisasi, Tata Kelola Desa. Menurut (Ardianti & Suartana, 2020) adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia yang baik akan membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. (Aziiz & Prastiti, 2019) menemukan hubungan antara digitalisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam seluruh sektor baik bisnis atau pemerintah untuk membantu keakuratan informasi pengelolaan keuangan dana desa secara efektif dan efisien. Sistem pelayanan publik yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sering disebut Siskeudes ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berkualitas juga terkait dengan tata kelola yang baik. Pentingnya tata kelola dalam menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dalam menyampaikan informasi, partisipatif dengan

melibatkan masyarakat dan akuntabel dalam mengolah laporan keuangan diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang jujur dan bertanggungjawab dengan tugas yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran teori penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2. 1 Kerangka PemikiranTeoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan *explanatory research*. *Explanatory research* adalah penelitian tautan antar variabel yang dihipotesiskan (Ghozali, 2018). Hipotesis yang diterangkan sebelumnya akan diuji kebenarannya. Hipotesis ini mengungkapkan ada tidaknya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, apakah ada pengaruh antar variabel dan apakah variabel tersebut dipengaruhi atau mempengaruhi variabel lainnya. Menurut (Ghozali, 2018) penelitian *explanatory research* menjelaskan pengungkapan kemungkinan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam pemetaan keadaan yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan analisis statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018), populasi adalah domain generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan

oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di berbagai Kecamatan di Kabupaten Tegal.

Pada penelitian ini peneliti memilih Desa di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Adiwerna sebagai objek yang diteliti karena pada dua kecamatan tersebut terdiri dari beberapa desa yang merupakan salah satu pemerintahan yang masih sering terjadi permasalahan (Dispermasdes.tegalkab, 2020). Dalam LKJ-IP (Slawi & Tegal, 2019) ditemukan beberapa masalah terkait dengan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah daerah dan sering terjadi beberapa kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Tegal yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan tersebut.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Dalam observasi ini menggunakan teknik sampling jenuh. Pengambilan sampling jenuh (sensus) adalah teknik pengambilan sampel ketika semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2018). Berdasarkan data di atas maka sampel yang digunakan pada riset ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan), dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemilihan unit analisis untuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan), dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), didasarkan pada keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pengelolaan dana desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden. Data primer dalam (Indriantoro & Supomo, 2016) pada penelitian ini menggunakan data yang berasal dari tanggapan terhadap kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam riset ini memakai metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode survei dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data cepat dari responden melalui beberapa pertanyaan, baik lisan maupun tertulis yang diharapkan akan meningkatkan *response rate* tinggi (Indriantoro & Supomo, 2016). Kuesioner berisis pertanyaan terkait informasi kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengukuran dalam penelitian ini mengukur pendapat responden dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi seseorang atau sekelompok terhadap fenomena sosial yang terdiri dari 5 pengukuran sebagai berikut:

- (1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) Tidak Setuju (TS)
- (3) Netral (N)
- (4) Setuju (S)

(5) Sangat Setuju (SS)

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y) yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Variabel independen (X) yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Digitalisasi, dan Tata Kelola Desa.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terkait) merupakan variabel yang dapat terpengaruh oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, dimana variabel bebas dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel independen (bebas) yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa.

3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan kewenangan. (Aziiz & Prastiti, 2019)	Relevan, dapat dibandingkan, andal, mudah dipahami. Sumber : (Aziiz & Prastiti, 2019)	Likert 1-5
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pemerintahan desa. (Ardianti & Suartana, 2020)	Pengetahuan, Keahlian teknis, Kemampuan untuk menemukan solusi, Inisiatif dalam bekerja, keramahan dan kesopanan. Sumber : (Purba et al., 2020)	Likert 1-5
Digitalisasi	Digitalisasi berbasis teknologi informasi meliputi pengolahan data elektronik, sistem dan proses kerja pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. (Delanno & Deviani, 2013)	Komputerisasi transaksi keuangan pembukuan, Pemanfaatan internet untuk distribusi laporan keuangan dan arsip dokumen, Pemanfaatan perangkat pintar untuk internal dan eksternal komunikasi, Dokumentasi tanpa kertas Sumber : (. et al., 2020)	Likert 1-5
Tata Kelola Desa	Tata kelola (<i>governance</i>) merupakan paradigm	Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas,	Likert 1-5

	baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola dengan tertib dan disiplin anggaran. (Ardianingsih & Mutmainah, 2019)	Tanggung jawab, Kemandirian, Kesetaraan (fairness). Sumber : (Kristiyanti, 2021)	
--	---	--	--

3.6 Teknik Analisis

Riset yang dilakukan bertujuan untuk memverifikasi apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) untuk mengolah data. Detail olah data yang akan digunakan : Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memungkinkan objek yang ingin dideskripsikan atau dianalisis dengan menggunakan data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok menggunakan minimum, maksimum, median, mean dan standar deviasi (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk memperkirakan sah/valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrument atau kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan

pada instrument atau kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Untuk mengukur kevalid-an kuesioner, yaitu membuat korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total konstruk atau variabel, sedangkan uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, n yang dimaksud adalah jumlah sampel.

- Jika r hitung $> r$ tabel maka pertanyaan dinyatakan valid.
- Jika r hitung $\leq r$ tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas merupakan alat ukur untuk mengukur sejauh mana kestabilan antara hasil pengamatan yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang berbeda. Kuesioner yang reliabel terjadi jika respon yang diberikan berdampak stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018).

Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik dengan menggunakan alat uji SPSS. Metode yang digunakan untuk menguji realibilitas kuesioner adalah dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika Cronbach alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi linier yang didapat memiliki konsistensi (Ghozali, 2018). Beberapa uji asumsi klasik yang digunakan meliputi :

1.) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan oleh regresi berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengambilan keputusan ditetapkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data terdistribusi normal dan jika nilai signifikan kurang dari

0,05 maka dapat dikatakan data tidak berdistribusikan normal.

2.) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan kondisi dimana model regresi menemukan korelasi yang sempurna antara variabel independen (Ghozali, 2018). Dalam model regresi yang baik, tidak terdapat korelasi antara variabel bebas. Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas menggunakan nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yaitu sebagai berikut :

- a) Jika nilai tolerance < 0,10 VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas
- b) Jika nilai tolerance > 0,10 VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas

3.) Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah suatu kondisi dimana dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Tujuan dilakukannya uji *heteroskedastisitas* adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika pengamatannya tetap, disebut *homokedastisitas* dan jika pengamatannya tidak tetap, disebut *heteroskedastisitas*. Pengujian *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan menggunakan grafik plot dan uji *glejser* (Ghozali, 2018).

Grafik plot merupakan cara untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residual SRESID. Dasar analisisnya adalah jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, maka telah teridentifikasi *heterokedastisitas*. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heterokedastisitas*.

Selain menggunakan grafik plot, uji *glejser* juga digunakan untuk menguji asumsi *heteroskedastisitas*. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji statistik *glejser* adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan > 0,05, maka tidak terjadi heteorkedastisitas

- Jika nilai signifikan < 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara parsial maupun simultan.

3.6.4.1 Analisis Model Regresi

Tujuan dari analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui untuk menghasilkan nilai variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, alat analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel terikat dengan 3 variabel bebas. Persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Digitalisasi

X_3 = Tata Kelola Desa

E = Standar Error

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), dimana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi atau nilainya mendekati 1, semakin baik hasil regresinya (Ghozali, 2018).

3.6.4.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji statistik F memungkinkan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hipotesis yang hendak di uji sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesisnya
 - a) $H_0 : \beta_i$ = variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
 - b) $H_a : \beta_i \neq$ variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Menentukan tingkat signifikan
Menggunakan *significant level* 0,05 atau $\alpha = 5\%$
3. Kriteria keputusan
 - a) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 akan ditolak atau H_a diterima, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 akan diterima atau H_a ditolak, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji seberapa jauh mana pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).

1. Hipotesis yang akan diuji :
 - a) $H_0 : \beta_i = 0$, artinya bahwa semua variabel independen secara parsial bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b) $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya bahwa semua variabel independen secara parsial merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Tingkat Signifikan
Dalam penelitian ini menggunakan standard $\alpha = 5\%$ (0,05).
3. Kriteria pengambilan keputusan
 - a) Jika signifikansi $< 5\%$ (0,05) dan arah koefisien β sesuai dengan arah hipotesis, maka H_0 ditolak, H_a diterima.
 - b) Jika signifikansi $> 5\%$ (0,05), maka H_0 diterima, H_a ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini menggunakan populasi beberapa Kecamatan di Kabupaten Tegal. Riset ini mempunyai tujuan dalam menganalisis determinan yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, 26 desa di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa tanggapan terhadap kuesioner yang disebar kepada responden antara lain kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 104 responden. Kuesioner disebar langsung ke lapangan (*Field Survey*).

Berikut adalah distribusi sampel penelitian :

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	104
Kuesioner yang kembali	104
Kuesioner tidak sah	0
Respon rate	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 104 (100%) kuesioner yang disebar, 104 (100%) di terima kembali. Dan kuesioner yang diterima kembali tidak ada kuesioner yang tidak sah sehingga jumlah kuesioner yang diolah berjumlah 104 data.

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jabatan. Berikut karakteristik responden :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	81	77,9%
Perempuan	23	22,1%
Total	104	100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2021

Dari tabel 4.2 di atas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan total 77,9%. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 26 Desa dalam penelitian ini, yang mendominasi adalah perangkat desa laki-laki yang berkedudukan sebagai kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa laki-laki lebih dominan daripada perangkat desa perempuan, karena laki-laki termasuk pesaing yang giat sedangkan perempuan memiliki orientasi keberhasilan yang tinggi (Santrock John W., 2008).

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase	Klasifikasi
Usia 26-35	18	17,3%	Masa dewasa awal
Usia 36-45	40	38,5%	Masa dewasa akhir
Usia 46-55	37	35,5%	Masa lansia awal
Usia 56-65	9	8,7%	Masa lansia akhir
Total	104	100%	

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini karakteristik usia yang digunakan ada 4 kelompok yaitu: usia 26-35, 36-45, 46-55, dan 56-65. Usia 26-35 tahun pada masa dewasa awal memiliki presentase 17,3%. Hal ini cenderung lebih kecil presentasinya dibandingkan pada masa dewasa akhir usia 36-45 tahun dengan perolehan sebesar 38,5%. Rentan usia pada masa lansia awal 46-55 tahun memiliki presentase sebesar 35,5% dan pada masa lansia akhir 56-65 tahun memiliki presentase sebesar 8,7%. Jumlah usia responden terbesar adalah 36-45 tahun yaitu sebanyak 38,5%, menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa dalam penelitian ini didominasi oleh usia dewasa akhir yang dianggap kurang profitabel.

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMP	3	2,9%
SMA	66	63,5%
D3	4	3,8%
S1	29	27,9%
S2	2	1,9%
Total	104	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Tingkatan pendidikan SMP dalam penelitian ini memperoleh presentase sebesar 2,9% dan pada tingkatan pendidikan SMA memperoleh presentase sebesar 63,5%. Tingkatan pendidikan D3 memperoleh presentase sebesar 3,8%. Pada tingkatan pendidikan Strata ada dua tingkatan yaitu S1 dengan perolehan sebesar 27,9% lebih besar dari presentase S2 yaitu sebesar 1,9%. Dalam penelitian ini, responden dengan pendidikan terakhir SMA memiliki

jumlah frekuensi terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, yaitu 63,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa yang menduduki jabatan sebagai kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pendidikan tinggi.

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Desa	26	25%
Sekretaris Desa	26	25%
Bendahara Desa (Kaur Keuangan)	26	25%
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	26	25%
Total	104	100%

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing memiliki frekuensi yang sama dengan total 26 responden (25%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Statistik dekskriptif hasil kuesioner yang ditampilkan meliputi deskripsi data tanggapan responden terhadap semua pertanyaan untuk memudahkan identifikasi tanggapan responden secara umum terhadap kuesioner yang telah dibagikan. Untuk mengetahui frekuensi intensitas keadaan masing-masing variabel dapat diketahui dengan mengalikan skor tertinggi pada setiap variabel dengan jumlah pertanyaan pada setiap variabel yang kemudian dibagi menjadi 5 kategori diantaranya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, dapat diartikan sebagai berikut :

Sangat rendah : 1,00 – 1,79

Rendah : 1,80 – 2,59

Sedang : 2,60 – 3,39

Tinggi : 3,40 – 4,19

Sangat tinggi : 4,20 – 5,00

4.2.1.1 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur dengan 11 indikator. Hasil respon dan analisis skor indeks variabel kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Skala Tanggapan Responden					Skor Indeks
		1	2	3	4	5	
1	X1.1	0	2	45	308	55	4,10
2	X1.2	0	4	48	292	65	4,09
3	X1.3	0	2	45	312	50	4,09
4	X1.4	0	2	27	276	125	4,30
5	X1.5	0	2	15	292	125	4,34
6	X1.6	0	10	30	280	95	4,15
7	X1.7	0	0	6	340	85	4,31
8	X1.8	0	0	9	308	120	4,37
9	X1.9	0	0	9	340	80	4,29
10	X1.10	0	0	0	272	180	4,52
11	X1.11	0	0	0	252	205	4,57

Rata-Rata Nilai Indeks Variabel	4,28
--	-------------

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indeks pada variabel yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori sangat tinggi, dengan rata-rata indeks 4,28. Nilai indikator tertinggi ada di indikator “ Saya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, maupun terhadap bidang/bagian lain” menghasilkan rata-rata sebesar 4,57. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pelayanan masyarakat yang baik. Namun pada indikator lain memiliki nilai yang terendah yaitu pada indikator “Saya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) dan “Saya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan teknik Sistem Akuntansi Pemerintah” dengan rata-rata 4,09 yang menunjukkan bahwa perangkat desa mengetahui dan memahami mengenai SAP karena hasil dari indikator tersebut masih tergolong tinggi walaupun hasil nilai lebih rendah dibandingkan indikator lainnya.

4.2.1.2 Deskripsi Variabel Digitalisasi

Variabel digitalisasi dalam penelitian ini diukur dengan 8 pertanyaan. Hasil tanggapan dan analisis skor indeks variabel digitalisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Digitalisasi

No.	Digitalisasi	Skala Tanggapan Responden					Skor Indeks
		1	2	3	4	5	
1	X2.1	0	0	21	232	195	4,48
2	X2.2	0	0	3	272	175	4,50
3	X2.3	0	0	57	264	95	4,16
4	X2.4	0	0	30	260	145	4,35

5	X2.5	0	0	0	284	165	4,49
6	X2.6	0	0	6	300	135	4,41
7	X2.7	0	4	102	220	65	3,91
8	X2.8	0	2	21	264	150	4,37
Rata-Rata Nilai Indeks Variabel							4,33

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan table 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai indeks pada variabel digitalisasi berada pada kategori sangat tinggi yaitu dengan indeks rata-rata 4,33. Nilai indikator tertinggi terdapat pada indikator “Memanfaatkan sistem keuangan desa dalam menginformasikan laporan keuangan yang akuntabel” dengan nilai rata-rata 4,50. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah menggunakan sistem keuangan desa dengan baik. Nilai terendah pada variabel digitalisasi dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu pada indikator “Telah mengganti penggunaan kertas dengan dokumen elektronik (digital) untuk mempermudah dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan” dengan rata-rata nilai 3,91 yang menunjukkan bahwa desa tidak sepenuhnya mengganti kertas dengan dokumen elektronik karena masih ada beberapa kepentingan yang mewajibkan penggunaan kertas.

4.2.1.3 Deskripsi Variabel Tata Kelola Desa

Pada penelitian ini variabel tata kelola desa diukur dengan 10 butir pertanyaan.

Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Tata Kelola Desa

No.	Tata Kelola Desa	Skala Tanggapan Responden					Skor Indeks
		1	2	3	4	5	
1	X3.1	0	0	18	292	125	4,35
2	X3.2	0	0	0	280	170	4,50

3	X3.3	0	0	24	288	120	4,32
4	X3.4	0	0	12	304	120	4,36
5	X3.5	0	0	3	324	110	4,37
6	X3.6	0	0	6	316	115	4,37
7	X3.7	0	0	0	292	155	4,47
8	X3.8	0	0	0	280	170	4,50
9	X3.9	0	0	3	304	135	4,42
10	X3.10	0	0	0	308	135	4,43
Rata-Rata Nilai Indeks Variabel							4,41

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa rata-rata nilai indeks pada variabel tata kelola desa berada pada kategori sangat tinggi yaitu dengan rata-rata indeks 4,41. Nilai indikator tertinggi pada variabel ini memiliki 2 indikator yaitu terdapat pada indikator “Saya mempertimbangkan saran dan kritik dari masyarakat” dan “Saya telah bekerja berdasarkan pedoman mengenai peran dan fungsi pengelolaan keuangan pemerintah desa” dengan nilai rata-rata 4,50. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola desa mampu memenuhi aspirasi masyarakat dan mengetahui peran dan fungsi dalam pemerintahan desa. Namun berbeda dengan nilai rata-rata indeks yang terendah dibandingkan dengan indikator lainnya hanya memiliki 1 indikator yaitu pada indikator “Saya dilibatkan dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan yang diawasi secara terus menerus” dengan rata-rata 4,32 yang menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa terlibat dalam pembuatan laporan keuangan.

4.2.1.4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan 11 butir pertanyaan.

Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Skala Tanggapan Responden					Skor Indeks
		1	2	3	4	5	
1	Y1.1	0	0	0	212	255	4,67
2	Y1.2	0	0	6	264	180	4,50
3	Y1.3	0	0	0	260	195	4,55
4	Y1.4	0	0	0	260	195	4,55
5	Y1.5	0	0	39	284	100	4,23
6	Y1.6	0	0	12	236	205	4,53
7	Y1.7	0	0	3	276	170	4,49
8	Y1.8	0	2	9	316	105	4,32
9	Y1.9	0	0	6	324	105	4,35
10	Y1.10	0	0	18	272	150	4,40
11	Y1.11	0	0	9	228	220	4,57
Rata-Rata Nilai Indeks Variabel							4,47

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan table 4.9 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata indeks variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berada pada kategori sangat tinggi, dengan rata-rata indeks 4,47. Nilai tertinggi terdapat pada indikator “Laporan keuangan dibuat lebih mudah, praktis, dan efisien menggunakan sistem teknologi yang memudahkan pengguna dalam menyusun laporan keuangan” dengan nilai rata-rata 4,57. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengguna. Nilai rata-rata indeks terendah pada variabel ini yaitu terdapat pada indikator “Informasi yang disajikan oleh kantor desa tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material” dengan rata-rata 4,23

yang menunjukkan bahwa dalam hal ini kantor desa tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dalam menyajikan informasi.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *product moment*, berdasarkan keputusan apakah tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 atau r hitung $>$ r tabel (lihat tabel r product yang dihasilkan tergantung jumlah sampel yang digunakan), maka validnya pertanyaan pada kuesioner terpenuhi. Berikut merupakan hasil uji validitas data dalam penelitian ini.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Data

Variabel		Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	0,709	0,191	Valid
		2	0,823		Valid
		3	0,743		Valid
		4	0,658		Valid
		5	0,567		Valid
		6	0,660		Valid
		7	0,623		Valid
		8	0,687		Valid
		9	0,771		Valid
		10	0,507		Valid
		11	0,563		Valid
X2	Digitalisasi	1	0,756	0,191	Valid
		2	0,778		Valid

		3	0,687		Valid
		4	0,790		Valid
		5	0,620		Valid
		6	0,631		Valid
		7	0,650		Valid
		8	0,779		Valid
X3	Tata Kelola Desa	1	0,681	0,191	Vaild
		2	0,634		Valid
		3	0,597		Valid
		4	0,694		Valid
		5	0,764		Valid
		6	0,686		Valid
		7	0,774		Valid
		8	0,766		Valid
		9	0,681		Valid
		10	0,683		Valid
Y	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1	0,631	0,191	Valid
		2	0,718		Valid
		3	0,774		Valid
		4	0,769		Valid
		5	0,658		Valid
		6	0,571		Valid
		7	0,727		Valid
		8	0,637		Valid

		9	0,695		Valid
		10	0,644		Valid
		11	0,636		Valid

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa hasil uji validitas data dari variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, tata kelola desa dengan variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, semuanya mendapat nilai r hitung $> r$ tabel. Dilihat dari tabel r product moment dengan jumlah N yang digunakan adalah 104 yang menunjukkan nilai r pada sig 0,05 (*Two Tail*) sebesar 0,191. Hal ini dapat diartikan bahwa semua pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Realibilitas

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*, jika *Cronbach Alpha* $> 0,70$ maka variabel tersebut dikatakan reliable tetapi jika *Cronbach Alpha* $< 0,70$ maka variabel dikatakan tidak reliable (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas pada penelitian ini .

Tabel 4. 11 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,803	Reliabel
Digitalisasi	0,853	Reliabel
Tata Kelola Desa	0,793	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,823	Reliabel

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji realibilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat dari variabel indepen yaitu kompetensi sumber daya manusia yang mendapat nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,803. Digitalisasi mencapai nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,853. Tata Kelola Desa diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,793. Sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,823. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji realibilitas masing-masing variabel memperoleh nilai *Cronbach Alpha* > 0,70, sehingga semua variabel dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan beberapa uji, antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel atau residual berdistribusi normal. Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistic non parametric *Kolmogorov Smirnov*. Data berdsitribusi normal jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan lebih besar 0,05 (Ghozali, 2018). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		UnstandardizedResidual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	,58674119
Most Extreme	Absolute	,080

Differences	Positive	,080
	Negative	-,077
Test Statistic		,080
Asymp.Sig. (2-tailed)		,101 ^c
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa uji normalitas pada model regresi dengan sampel yang ditetapkan sebanyak 104, setelah diuji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai tingkat signifikansi sebesar 0,101 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi secara normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang sempurna antara variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,112	8,898
Digitalisasi	,101	9,931
Tata Kelola Desa	,243	4,112

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen (kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, tata kelola desa) memiliki nilai tolerance lebih besar dari 10% (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dan dapat digunakan untuk memperkiraan hal-hal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dalam model regresi antara residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glesjser*. Kriteria keputusan dalam uji *glejser* adalah jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,909
Digitalisasi	0,262
Tata Kelola Desa	0,070

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data semua variabel memperoleh nilai Sig. lebih dari 0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini layak untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh *independent variable* dan *dependent variable*. Hasil regresi dengan bantuan program pengolahan data SPSS tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah:

Tabel 4. 15 Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1,018	1,024	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,143	0,071	0,141
Digitalisasi	0,421	0,110	0,350
Tata Kelola Desa	0,607	0,061	0,513

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Dari tabel 4.15 hasil pengolahan data model regresi linear yang dihasilkan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,018 + 0,143X_1 + 0,421X_2 + 0,607X_3 + e$$

Keterangan :

X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 : Digitalisasi

X_3 : Tata Kelola Desa

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 1,018 merupakan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa konstan atau tetap, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai positif.
2. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia adalah 0,143 bernilai positif, yang berarti bahwa jika kompetensi sumber daya manusia (X1) naik satu satuan maka akan menaikkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,143 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Nilai koefisien digitalisasi sebesar 0,421 yang bernilai positif, artinya jika digitalisasi (X2) bertambah satu satuan maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,421 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien tata kelola desa sebesar 0,607 yang bernilai positif artinya jika tata kelola desa (X3) meningkat satu satuan maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,607 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi antara nol sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin tinggi koefisien determinasi (R^2) atau nilainya mendekati satu, maka hasil model regresi untuk menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin kuat. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,988 ^a	,977	,976	,59548
a. Predictors : (Constant), X3, X1,X2				
b. Dependent Variable : Y1				

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Pada tabel 4.16 di atas terlihat bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 0,976 atau 97,6%. Artinya variabel independen (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Digitalisasi, dan Tata Kelola Desa) dapat menjelaskan variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar 97,6% sedangkan sisanya (2,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.6.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang ditunjukkan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah jika nilai Sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan, sedangkan jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak ada pengaruh secara simultan. Hasil Uji F sebagai berikut :

Tabel 4. 17 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1505,002	3	501,667	1414,769	,000 ^b
	Residual	35,459	100	,335		
	Total	1540,462	103			

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Hasil pengolahan data pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai Sig. F 1414,769 dengan tingkat signifikan 0,000. Artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) dan menunjukkan bahwa semua variabel indepen (Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Digitalisasi, dan Tata Kelola Desa) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa).

4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya adalah konstanta (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan adalah jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Apabila tingkat signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4. 18 Hasil Uji t

	Model	B	Sig.	Hasil	Keterangan
1	(Constant)	1,018	,323		
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,143	,047	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Digitalisasi	,421	,000	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Tata Kelola Desa	,607	,000	Positif signifikan	Hipotesis diterima

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa pengujian secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan nilai koefisien b 0,143, dimana nilai signifikansi $0,047 < 0,05$, maka dinyatakan bahwa hipotesis (H1) adalah **“diterima”**.

2. Pengaruh digitalisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa pengujian secara parsial digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien b sebesar 0,421, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dinyatakan bahwa hipotesis (H2) adalah **“diterima”**.
3. Pengaruh tata kelola desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa pengujian secara parsial tata kelola desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan dengan nilai koefisien b sebesar 0,607, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dinyatakan bahwa hipotesis (H3) adalah **“diterima”**.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian penelitian di atas terkait dengan pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi, dan tata kelola desa secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperoleh hasil penelitian dengan pembahasan sebagai berikut :

4.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan mengindikasikan kompetensi sumber daya manusia yang baik menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik pula. Jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Berdasarkan nilai rata-rata indeks variabel

kompetensi sumber daya manusia diperoleh sebesar 4,28. Berdasarkan kategori indeks skor, rata-rata berada pada kategori sangat tinggi. Selain itu, dapat dilihat dari perangkat desa yang didominasi jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 77,9% yang termasuk pesaing ulet dalam bekerja serta mayoritas tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa sudah cukup baik dengan pendidikan terakhir di SMA. Efektivitas pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tentang pengelolaan dana desa yang unggul dapat menunjang tingginya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti pelatihan, pengetahuan akuntansi dan dana desa serta pemahaman tentang peraturan pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah (Ardianti & Suartana, 2020). Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pemerintah telah memiliki keahlian yang baik dalam kompetensi sumber daya manusia karena merupakan bagian dari tanggungjawab kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurhakim & Yudianto, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Widyatama et al., 2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi diketahui berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa adalah mampu menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik sehingga semakin baik digitalisasi maka semakin baik pula kapasitas pemerintah desa dalam menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini didasarkan pada rata-rata nilai indeks

variabel digitalisasi yang termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 4,33. Sedangkan hal lain disebabkan karena faktor usia perangkat desa yang mayoritas masih dalam masa dewasa akhir (usia 36-45) serta didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa sudah memadai dapat mencukupi pemahaman teknologi yang digunakan pemerintah desa dalam mengolah dan menyajikan informasi laporan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa sudah cukup memahami dan mengerti dalam pengolahan laporan keuangan desa berbasis teknologi yang disediakan. Pemanfaatan teknologi dengan menggunakan sistem keuangan desa ini akan lebih efisien dalam melakukan pengolahan akuntabilitas dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hendaris & Romli, 2021) serta (Nurkhasanah, 2019), (Aziiz & Prastiti, 2019) menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Pahlawan et al., 2020) yang membuktikan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Tata Kelola Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata kelola desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil kuesioner yang diperoleh mengungkapkan bahwa responden beranggapan bahwa tata kelola desa di wilayahnya sudah baik. Hal ini didasarkan pada rata-rata indeks variabel tata kelola desa yang termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 4,41. Tata kelola desa menggambarkan sistem yang digunakan dalam pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Makalalag et al., 2017). Hal ini dapat diartikan bahwa tata kelola desa yang baik mampu meningkatkan pengelolaan dana desa dalam suatu pemerintahan desa, dilihat dari optimalnya tanggung jawab pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintah serta penerapan dan pengembangan prinsip tata kelola desa yang maksimal atas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ubaidillah & Arumsari, 2019) serta (Ardianingsih & Mutmainah, 2019) menunjukkan bahwa tata kelola desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Zeyn, 2011) yang membuktikan bahwa tata kelola desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa studi kasus di Kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Software Statistic Product and Service Solutions* (SPSS) terhadap 104 sampel perangkat desa dengan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karakteristik perangkat desa dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai serta efektivitas pembinaan dari pemerintah dapat meningkatkan kompetensi perangkat desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena cukupnya pemahaman teknologi yang dimiliki perangkat desa guna mengolah dan menyajikan informasi laporan keuangan desa yang lebih efisien.
3. Tata kelola desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebagian besar pemerintah desa telah menggunakan sistem tata kelola desa dengan baik untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti hanya melakukan penelitian di Kecamatan Slawi dan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneraisasi kondisi pemerintah desa secara keseluruhan di luar obyek penelitian.
2. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti hanya kuesioner dan data yang diperoleh berdasarkan tanggapan pribadi responden yang memiliki kemungkinan terjadi perbedaan persepsi terhadap konten pertanyaan.
3. Keterbatasan penggunaan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi dan tata kelola desa.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

5.3.1 Bagi Akdemisi

Dari penelitian diatas, diketahui nilai *Adj. R-Square* yang tinggi yaitu 97,6% yang berarti masih ada 2,4% variabel lain dari penelitian ini yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian di lokasi yang berbeda sehingga dapat menjadi referensi tambahan dan menambahkan konstruksi ilmu dalam nilai-nilai islam terhadap variabel yang digunakan seperti kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengambilan data dengan cara wawancara secara langsung kepada responden guna meningkatkan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan.

5.3.2 Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebaiknya memperbanyak pelatihan terkait dengan penggunaan teknologi mengingat tuntutan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kebutuhan teknologi untuk mendukung pengelolaan dana desa dari waktu ke waktu semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Ardianingsih, A., & Mutmainah, I. (2019). Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik Untuk Akuntabilitas Dana Desa. *Job Outlook Mencari Atribut ...*, 21–29. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/job/article/view/169>
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). *Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 1041–1054.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Dariana, A. M. H. (2020). Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124–139.
- Delanno, G. F., & Deviani. (2013). Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 21–46.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Diansari. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 1-11, 412–418.
- DiNapoli, T. P. (2007). *Standarts for Internal Control in New York State Government*. October.

Dispermasdes.tegalkab. (2020). *DISPERMASDES GELAR RAPAT KERJA PERCEPATAN PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN DD DAN ADD 2020*. Wwww.Dispermasdes.Tegalkab.Go.Id.

Firmanzah. (2014). *Pembangunan Partisipatif Melalui UU Desa*. Retrieved 22 Mei 2018, from [Http://Setkab.Go.Id/Artikel-12385-.Html](http://Setkab.Go.Id/Artikel-12385-.Html).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartikayanti, H. N., & Jayanti, D. (2020). Internal Factors Affecting the Accountability of Village Fund Governance: Evidence from Indonesia. ... *Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 07(11), 628–641. <http://repository.unjani.ac.id/repository/9bb906083711a75d4fbbc1a136561cee.pdf>

Hendaris, B., & Romli, R. (2021). ... of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and *Dinasti International Journal of Management* ..., 2(4), 569–580. <https://dinastipub.org/DIJMS/article/view/784>

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPF EYogyakarta.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics.*, 305-360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Jorge, S., dan Pattaro, A. F. (2011). Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants. 13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting 9-10 June 2011, Ghent (Belgium), 4(June). 1–24 *Journal of Accounting and Economics.*, 183–199.

Kemenkeu.go.id. (2019). Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015. *Kemenkeu.Go.Id*.

Kompas.com. (2020). ICW: Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi Sepanjang 2019, Kerugian Rp 32,2 Miliar. *Kompas.Com*.

- Kristiyanti, L. M. S. (2021). The implementation of good corporate governance, village apparatus performance, organizational culture, and its effects against village fund management accountability (Case study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(1), 1985–1996.
- Kurniasih, D., & Israwan Setyoko, P. (2019). Public Governance Capacity in the Accountability of Village-Owned Enterprise Management in Indonesia. *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 05(02), 67–79. <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v5i2.1745>
- Kurniawan, D. T. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(1), 1689–1699.
- Laka, M. D. L. M. W. (2020). Accountability, information technology and village performance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(2), 71–78. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n2.874>
- M., -, W., & Zahrah Buyong, S. (2020). DIGITALIZATION OF ACCOUNTING INFORMATION IMPACT ON MSMEs' PROFITABILITY AND PRODUCTIVITY. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 5(2), 867. <https://doi.org/10.31093/jraba.v5i2.233>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mantako, S. A. A., Said, D., & Nurleni. (2019). *The Influence of Organizational Commitment , Competence of Village Fund Management Officers , and Utilization of Information Technology on Accountability of Village Financial Management*. 20, 94–105.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. , Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 § (2014).*
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management in Panyirapan Village, Sukanagara Village and Soreang Village, Soreang Sub-District, Bandung Regency. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 34. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Magelang*, 53(9), 1689–1699.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Purba, H., Kurniawati, E., & Jamain, T. H. (2020). Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management (Case Study at the Village Office in Pangandaran District Pangandaran Regency). *International Journal of Economics and Management Studies*, 7(3), 179–188. <https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v7i3p123>
- Santrock John W. (2008). Psikologi Pendidikan. In *Psikologi Pendidikan, Edisi Kedua* (p. Jakarta : Kencana).
- Sanusi, Z. M., Johari, R. J., Said, J., & Iskandar, T. (2015). The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 156–162. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01095-3](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01095-3)
- Shields, R., Banerjee, S., Shajahan, P. K., Singh, G. B., Bista, M. B., Krishna, G., Paudel, M., Singh, A., Hernandez, A. S., Carney, S., Kameshwara, K. K., & Dhanda, K. R. (2021). The double pendulum: Accountability relationships and learning in urban South Asia. *International Journal of Educational Development*, 84(May), 102438. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102438>

Slawi, K., & Tegal, K. (2019). *Kecamatan slawi*. 1.

Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang*.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In *Alfabet*.

Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019). Pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*, 0(0), 271–277. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNHP/article/view/799>

Warsita, B. (2008). *Teknologi pembelajaran: Landasan dan aplikasinya*. Jakarta: Rineka.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>